

KEBERLANJUTAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS PASCA PROGRAM REHABILITASI PADA PANTI SOSIAL BINA NETRA HITBIA DINSOS PRIVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Petrus Alfa Dhae Ude¹, Urbanus Ola²

petrusude10@gmail.com¹

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Keberlanjutan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Pasca Program Rehabilitasi pada Panti Sosial Bina Netra Hit Bia Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Perlindungan Sosial bagi Disabilitas Binaan Dinas Sosial Provinsi NTT di Kelurahan Maulafa Kota Kupang). Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah keberlanjutan program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas pasca program rehabilitasi pada Panti Sosial Bina Netra Hit Bia Dinas Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT di Kelurahan Maulafa Kota Kupang. Teori yang digunakan adalah teori Keberlanjutan Perlindungan Sosial yang mencakup tiga aspek: keamanan sosial, akses universal, dan bantuan ekonomi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dari informan dan data sekunder dari dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aspek keamanan sosial telah terwujud melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara komprehensif, meliputi tempat tinggal, makanan bergizi, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pembinaan mental dan sosial. Panti tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan selama masa rehabilitasi, tetapi juga membekali penerima manfaat dengan pelatihan orientasi dan mobilitas, pembelajaran huruf Braille, keterampilan kerja, serta pendampingan psikososial. Keberhasilan ini didukung oleh landasan regulasi yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2024, dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019, sehingga tercipta lingkungan rehabilitasi yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi. 2) Aspek akses universal telah berjalan melalui pemberian kesempatan yang setara kepada seluruh penyandang disabilitas untuk mengikuti layanan rehabilitasi tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi individu, termasuk akses terhadap pendidikan, pembelajaran huruf Braille, orientasi dan mobilitas, serta pelatihan vokasional seperti pijat, pertanian, dan peternakan. Program ini terbukti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan kepercayaan diri penerima manfaat, meskipun cakupan layanan masih perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata. 3) Aspek bantuan ekonomi diwujudkan melalui pendekatan pemberdayaan yang mengintegrasikan pelatihan keterampilan vokasional dengan pemberian bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000 kepada setiap penerima manfaat yang memenuhi persyaratan. Namun, efektivitas bantuan ekonomi belum sepenuhnya optimal karena masih terbatasnya pendampingan berkelanjutan dalam aspek perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk pasca penyaluran bantuan, sehingga keberlanjutan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa keberlanjutan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas pada Panti Sosial Bina Netra Hit Bia telah berjalan secara efektif dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat, meskipun masih terdapat sejumlah kendala teknis dan keberlanjutan pendampingan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, khususnya pada aspek bantuan ekonomi.

Kata Kunci: Keberlanjutan, Perlindungan Sosial, Penyandang Disabilitas, Panti Sosial Bina Netra Hit Bia.

ABSTRACT

This thesis is entitled The Sustainability of Social Protection for Persons with Disabilities After the Rehabilitation Program at the Hit Bia Blind Rehabilitation Center under the Social Affairs Office of East Nusa Tenggara Province (A Case Study of Social Protection for Persons with Disabilities Assisted by the Social Affairs Office of NTT Province in Maulafa Sub-district, Kupang City). The research problem addressed is how the social protection program for persons with disabilities has been sustained after the rehabilitation program at the Hit Bia Blind Rehabilitation Center, carried out by the Social Affairs Office of NTT Province in Maulafa Sub-district, Kupang City. The theory employed is the theory of Social Protection Sustainability, which encompasses three aspects: social security, universal access, and economic assistance. This research uses a qualitative method, with primary data sourced from informants and secondary data from related documents. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation, while data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and descriptive qualitative conclusion drawing. The results of the research show that: 1) The aspect of social security has been realized through the comprehensive fulfillment of basic needs, including shelter, nutritious food, health services, education, as well as mental and social guidance. The center not only functions as a service provider during the rehabilitation period but also equips beneficiaries with orientation and mobility training, Braille literacy, work skills, and psychosocial assistance. This achievement is supported by a strong regulatory foundation, namely Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Governor Regulation of East Nusa Tenggara Province Number 48 of 2024, and Kupang City Regional Regulation Number 2 of 2019, thereby creating a safe, inclusive, and discrimination-free rehabilitation environment. 2) The aspect of universal access has been carried out by providing equal opportunities for all persons with disabilities to participate in rehabilitation services regardless of social background, economic status, or individual condition, including access to education, Braille literacy, orientation and mobility, and vocational training such as massage, agriculture, and animal husbandry. This program has proven to improve beneficiaries' knowledge, skills, independence, and self-confidence, although the scope of services still needs to be expanded so that its benefits can be enjoyed more evenly. 3) The aspect of economic assistance has been realized through an empowerment approach that integrates vocational skills training with the provision of business capital assistance amounting to Rp5,000,000 for each beneficiary who meets the requirements. However, the effectiveness of this economic assistance has not been fully optimal due to the limited continuity of mentoring in business planning, financial management, and product marketing after the disbursement of assistance, so that the sustainability of economic empowerment for persons with disabilities still requires further strengthening. Based on the analysis above, the author concludes that the sustainability of social protection for persons with disabilities at the Hit Bia Blind Rehabilitation Center has been running effectively and has contributed significantly to improving the quality of life of beneficiaries, although a number of technical obstacles and challenges in the continuity of mentoring remain and require further attention, particularly with regard to the aspect of economic assistance.

Keywords: Sustainability, Social Protection, Persons With Disabilities, Hit Bia Blind Rehabilitation Center.

PENDAHULUAN

Menurut ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) pada UU No. 39 Tahun 1999 pasal 5 ayat 1 dan 3 menjelaskan, setiap manusia berhak mendapat perlakuan yang sama dan adil tanpa memandang kaya atau miskin, dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas (Media et al., 2019). Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk hidup layak, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta terlibat aktif dalam pembangunan. Isu disabilitas terus menjadi perhatian penting dalam konteks Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Pemerintah telah berkomitmen memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan dan program. Hal ini tercermin dalam upaya berkelanjutan untuk

meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik, penyediaan pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan kerja, serta kolaborasi dengan lembaga sosial dan komunitas disabilitas.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan, disabilitas adalah istilah umum yang mencakup gangguan fungsi tubuh atau struktur, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Sementara itu, menurut Shakespeare (2006), disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik atau mental seseorang, tetapi juga mencerminkan “interaksi antara individu dengan hambatan dan lingkungan sosial yang tidak mendukung.” Pandangan ini sejalan dengan paradigma baru yang menempatkan disabilitas sebagai persoalan hak asasi manusia, bukan semata-mata masalah medis. Hal ini berarti penyandang disabilitas perlu mendapat perlindungan sosial.

Perlindungan sosial adalah jaring pengaman yang dirancang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas. Menurut Barrientos (2010), “sustainability in social protection is not merely about funding, but about political will, institutional capacity, and long-term vision.” Artinya, keberlanjutan program perlindungan sosial sangat bergantung pada kemauan politik, kelembagaan yang kuat, dan perencanaan jangka panjang yang inklusif. Hal ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen yang menekankan bahwa “pembangunan adalah perluasan kebebasan substantif bagi semua orang”. Dalam konteks disabilitas, pembangunan yang berkelanjutan tidak bisa dicapai tanpa menjamin akses yang setara dan partisipasi penuh bagi para penyandang disabilitas (TENTANG & MANUSIA, 1999).

Pada dasarnya penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk ketidaksetaraan, baik dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, maupun perlindungan sosial. Di Indonesia, termasuk di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), upaya perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas telah mulai dilakukan melalui berbagai program pemerintah, seperti bantuan sosial tunai, layanan rehabilitasi sosial, dan dukungan aksesibilitas. Hal ini dinilai penting karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Oleh karena itu, mereka memerlukan perhatian khusus dalam bentuk perlindungan sosial yang berkelanjutan agar tidak tertinggal secara sosial, ekonomi, maupun politik.

Secara nasional, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan data BPS 2023 mencapai sekitar 22,97 juta jiwa, setara dengan 8,5% dari total penduduk. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai lebih dari 2000 jiwa, dengan konsentrasi jumlah terbesar di Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi (Indonesian Journal of Physical and Medical Rehabilitation 2025). Namun, di balik angka tersebut, masih banyak penyandang disabilitas yang belum terakses layanan dasar dan perlindungan sosial secara optimal.

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat secara setara dengan orang lain. Upaya mengatasi persoalan kelompok rentan/disabilitas ini pemerintah Prov NTT melalui Dinas Sosial telah melaksanakan sejumlah program seperti bantuan sosial rutin, layanan rehabilitasi, pendidikan inklusif, dan pelatihan kerja. Salah satu program yang sering dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT yaitu melaksanakan pelatihan kerja bagi kelompok penyandang disabilitas. Salah satu program yang dilakukan secara intensif adalah program rehabilitasi dalam panti sesuai kewenangan konkuren bidang sosial sebagai tugas kewajiban yang diemban pemerintah provinsi (Lamp. UU No.23/2014).

Untuk menjalankan tanggungjawab tersebut Dinas Sosial Prov NTT menjalankan program rehabilitasi sosial dalam panti pada Panti Sosial Bina Netra Hitbia, panti sosial yang menghimpun para penyandang disabilitas yang kemudian diberikan bimbingan, pelatihan dan pendampingan. Pendidikan, bimbingan dan pendampingan tersebut bertujuan memampukan para penyandang disabilitas menjadi mandiri mengurus diri sendiri dan mandiri menafkai diri dalam hidup bermasyarakat. Namun, realisasi program-program tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil penyandang disabilitas secara menyeluruh dan berkelanjutan, hal ini dipengaruhi beberapa tantangan-tantangan utama yang dihadapi antara lain:

1. Ketergantungan pada anggaran tahunan: Program mudah terhenti jika tidak mendapat alokasi anggaran yang memadai.
2. Data yang tidak akurat: Penyandang disabilitas yang tidak terdata secara resmi akan terabaikan dari program.
3. Stigma sosial dan rendahnya partisipasi: Penyandang disabilitas sering kali tidak dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi program yang menyangkut hidup mereka.
4. Kurangnya pendekatan lintas sektor: Perlindungan sosial seharusnya terintegrasi dengan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.

Dari tantangan yang ada seharusnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki peran penting dalam keberlanjutan program upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas ketika berada di luar panti. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan kebijakan hingga penyediaan layanan yang aksesibel dan ramah disabilitas. Pendekatan berkelanjutan terhadap penyandang disabilitas merujuk pada komitmen jangka panjang untuk memastikan pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kebijakan, program, serta lingkungan sosial yang inklusif dan terus berkembang. Pendekatan ini tidak hanya bersifat sementara atau reaktif, tetapi berkelanjutan, terarah, dan berbasis hak asasi manusia. Kebijakan jangka panjang pemerintah dan lembaga terkait membuat regulasi dan program yang tidak hanya memfasilitasi kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung partisipasi aktif disabilitas dalam pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang aksesibel dan tahan lama. Pembangunan fasilitas publik seperti trotoar, sekolah, kantor, dan rumah sakit dirancang ramah disabilitas dengan mempertimbangkan akses jangka panjang.

Kurangnya monitoring dan evaluasi, serta ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keberlanjutan program dapat terjamin dalam jangka panjang. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Kupang antara lain yaitu komitmen pemerintah daerah, baik dalam regulasi maupun implementasi, ketersediaan anggaran termasuk diversifikasi sumber pendanaan, kapasitas lembaga pelaksana meliputi kualitas sumber daya manusia dan sistem data, partisipasi penyandang disabilitas agar program sesuai dengan kebutuhan nyata, dan kerja sama multi pihak antara pemerintah swasta, LSM, dan masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan sosial tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi juga dapat menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas dalam jangka panjang. Individu penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi resiko yang cukup signifikan, sekitar 9% penduduk Indonesia mengalami disabilitas sedang dan berat yang menyebabkan beban biaya tambahan untuk berpartisipasi dalam masyarakat lebih tinggi jika dibandingkan penduduk tanpa disabilitas oleh karena itu penyandang disabilitas biasanya lebih tinggi kemungkinannya untuk dalam hidup kemiskinan, serta harus bergantung pada anggota

keluarga mereka baik secara ekonomi maupun sosial.

Walaupun saat ini sistem perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas berupa jaminan pendapat minimum telah ada, namun jumlahnya sangat terbatas dan sekitar 94,5% penduduk disabilitas berat tersebut belum memperoleh manfaat dari program-program perlindungan sosial yang tersedia bantuan atau tunjangan disabilitas bagi penyandang disabilitas berat di lengkapi dengan konsesi yang bermanfaat, akan dapat mengurangi beban biaya hidup yang harus di tanggung dan akan secara signifikan berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan pada kelompok tersebut. Bantuan tunjangan disabilitas juga akan melengkapi skema perlindungan sosial yang sudah ada, seperti manfaat disabilitas dalam PKH dan pada skema jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan manfaat saat kompensasi pada penyandang disabilitas jika mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja, walaupun masih terbatas pada pekerja penerima upah atau sektor formal.

Kelompok rentan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau menghuni Panti Sosial Bina Netra Hitbia Dinsos Provinsi NTT dalam kurun waktu tertentu dikembalikan untuk berbaur dengan sesama. Ada yang kembali ke rumah keluarga ada yang berjuang hidup mandiri. Melihat berbagai keterbatasan yang disandang, kelompok rentan/disabilitas yang telah didik, dilatih dan dibina, sulit menjalani hidup mandiri dibawa tekanan kebutuhan yang terus meningkat dan persaingan untuk mengais rezeki. Pendidikan dan pelatihan memberikan akses kepada penyandang disabilitas terhadap pendidikan formal maupun non-formal, serta pelatihan kerja agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang. Kesadaran dan perubahan sosial yang terus menerus mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar tidak memandang penyandang disabilitas sebagai beban, melainkan sebagai bagian berharga dari komunitas. Namun kondisi riil menunjukkan bahwa berbagai program digulirkan tersebut belum menjadi jaminan untuk memandirikan kelompok disabilitas ini, program tidak hanya berhenti pada pembinaan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan adanya pengawasan keberlanjutan yang terus dijalankan untuk memastikan kemandirian dari penyandang disabilitas dalam menjalankan hidup ditengah masyarakat secara aman dan tentram.

Dengan memperhatikan kenyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul “Keberlanjutan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pasca Program Rehabilitasi Pada Panti Hitbia Dinsos Provinsi NTT (Studi Kasus Perlindungan Sosial Bagi Disabilitas Binaan Dinas Sosial Provinsi NTT Di Kelurahan Maulafa Kota Kupang)”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Keberlanjutan Program Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pasca Program Rehabilitasi Pada Panti Sosial Bina Netra Hitbia yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT Di Kelurahan Maulafa Kota Kupang.

METODOLOGI

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif. Penelitian deskripsi kualitatif adalah penelitian yang mengutamakan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang sedang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik (utuh) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah (Maleong, 2013:6)

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui dan membahas keberlanjutan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas pasca program rehabilitasi pada panti Sosial Bina Netra Hitbia Dinsos Provinsi Nusat Tenggara Timur.

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif, yang menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan memahami keberlanjutan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas pasca program rehabilitasi pada panti Sosial Bina Netra Hitbia Dinsos Provinsi Nusat Tenggara Timur.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini dibutuhkan sejumlah informan sebagai sumber data. Berdasarkan teknik pengupulan data dan pertimbangan penentuan informan maka yang menjadi informan penelitin ini 15 orang sebagai berikut:

Informan	Jumlah
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	1 orang
Pengurus Panti Hitbia	2 Orang
Disabilitas Binaan Dinas Sosial Provinsi NTT	2 Orang
<u>Masyarakat Kelurahan Maulafan</u>	<u>2 Orang</u>

Total : 7 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi.

Menurut Soemitro (1985:62) menjelaskan observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan secara sengaja, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui observasi yang dimana berupa pengamatan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan Keberlanjutan Program Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pasca Program Rehabilitasi Pada Panti Sosial Bina Netra Hitbia yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT Di Kelurahan Maulafa Kota Kupang.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatapan muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber (Burhan Bungin 2013:133). Dalam alur wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, karena akan mempermudah untuk diperolehnya data secara mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengupulan data dengan mengumpulkan dokumen, dan rekaman, seperti surat kabar, buku harian, nasakah pribadi, foto-foto, catatan kahsus, dan lainnya. Penelitian ini akan menggupulkan data dengan cara menelaah catatan-catatan dan dokumen-dokumen guna memperoleh informasi dan pengetahuan tentang visi misi, struktur organisasi, laporan-laporan tentang Keberlanjutan Program Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pasca Program Rehabilitasi Pada Panti Sosial Bina Netra Hitbia yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT Di Kelurahan Maulafa Kota Kupang.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis untuk mencari dan menyusun untuk memperoleh hasil dari wawancara, dobservasi, dan dokumntasi sehingga dapat dipahami serta hasil temuan tersebut kemudian dapat dipaparkan dan diinformasikan kepada orang lain. Data-data yang

diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dari hasil wawancara dan catatan lapangan.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data kemudian data disajikan. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, namun lebih sering bentuk teks yang naratif dan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teks yang bersifat naratif dan gambar hasil dokumentasi. Dalam penyajian data akan sesuai dengan sub-subnya masing-masing.

3. Kesimpulan

Analisis data kualitatif yang terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang dibuat merupakan temuan baru yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian mengenai Keberlanjutan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Pasca Program Rehabilitasi pada Panti Sosial Bina Netra Hit Bia Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Perlindungan Sosial bagi Disabilitas Binaan Dinas Sosial Provinsi NTT di Kelurahan Maulafa Kota Kupang), penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka analisis yang digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pelaksanaan keberlanjutan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Keberlanjutan perlindungan sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai serangkaian kebijakan, program, dan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Sosial untuk menjamin agar penyandang disabilitas tetap memperoleh perlindungan, kesempatan, dan dukungan setelah keluar dari panti rehabilitasi. Perlindungan sosial tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan selama proses rehabilitasi, tetapi juga sebagai upaya berkelanjutan dalam menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui penyediaan layanan yang inklusif, pemberdayaan, serta penguatan kapasitas agar mereka mampu hidup mandiri, produktif, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan perlindungan sosial menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui sinergi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Keberlanjutan perlindungan sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai proses yang menjamin penyandang disabilitas tetap memperoleh perlindungan, kesempatan, serta akses terhadap berbagai layanan sosial setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Perlindungan sosial tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar selama berada di panti, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kualitas hidup melalui penguatan kapasitas individu, pemberian kesempatan yang setara, serta pemberdayaan ekonomi agar penyandang disabilitas mampu menjalankan fungsi sosial dan ekonominya secara mandiri. Dengan demikian, keberhasilan keberlanjutan perlindungan sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan yang berkesinambungan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta membangun dukungan keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Pada bagian ini, penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keberlanjutan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas pasca program rehabilitasi pada Panti Sosial Bina Netra Hit Bia Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala UPTD Panti Sosial Bina Netra Hit Bia, pendamping rehabilitasi, penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat, keluarga penerima manfaat, serta masyarakat di Kelurahan Maulafa Kota Kupang. Selain itu, penelitian ini didukung oleh hasil observasi lapangan dan dokumentasi terhadap berbagai program rehabilitasi dan perlindungan sosial yang telah dilaksanakan. Temuan penelitian kemudian dianalisis berdasarkan indikator-indikator penelitian yang telah ditetapkan untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan perlindungan sosial dilaksanakan setelah penyandang disabilitas menyelesaikan program rehabilitasi. Dalam menganalisis temuan tersebut, penelitian ini menggunakan satu variabel utama, yaitu keberlanjutan perlindungan sosial, yang dianalisis melalui tiga indikator, yaitu keamanan sosial, akses universal, dan bantuan ekonomi. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjamin keberlanjutan perlindungan sosial sehingga penyandang disabilitas tetap memperoleh perlindungan, kesempatan, dan dukungan dalam menjalani kehidupan secara mandiri di tengah masyarakat.

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga indikator utama. Pertama, keamanan sosial, yang mencakup upaya pemerintah dalam menjamin rasa aman bagi penyandang disabilitas melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pembinaan mental, pengembangan keterampilan, perlindungan hukum, serta pendampingan yang mendukung proses reintegrasi sosial setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Indikator ini dianalisis untuk mengetahui sejauh mana penyandang disabilitas memperoleh perlindungan dari berbagai risiko sosial, ekonomi, maupun psikologis sehingga mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan bermartabat. Kedua, akses universal, yang mencakup kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan rehabilitasi, pendidikan, pelatihan keterampilan, informasi, pelayanan publik, kesempatan kerja, serta berbagai fasilitas sosial tanpa adanya diskriminasi. Indikator ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana prinsip kesetaraan dan inklusivitas telah diterapkan dalam penyelenggaraan perlindungan sosial sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan. Ketiga, bantuan ekonomi, yang meliputi pemberian bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pengembangan keterampilan vokasional, pendampingan usaha, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja dan sumber-sumber ekonomi lainnya. Indikator ini dianalisis untuk mengetahui sejauh mana dukungan ekonomi yang diberikan mampu meningkatkan kemandirian, produktivitas, dan kesejahteraan penyandang disabilitas setelah menyelesaikan program rehabilitasi, sehingga tujuan keberlanjutan perlindungan sosial dapat diwujudkan secara berkesinambungan.

5.1 Keamanan Sosial

Keamanan sosial dalam keberlanjutan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas pasca program rehabilitasi di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dimensi fundamental dalam menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Implementasi keamanan sosial diwujudkan melalui penyediaan layanan yang komprehensif, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, makanan bergizi, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai bentuk pembinaan yang mendukung proses rehabilitasi. Selain

memenuhi kebutuhan fisik, panti juga menciptakan lingkungan rehabilitasi yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga memungkinkan penyandang disabilitas menjalani proses adaptasi, pemulihan, dan pengembangan diri secara optimal. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keamanan sosial tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari risiko sosial, tetapi juga sebagai upaya menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Lebih lanjut, keamanan sosial juga diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas individu agar mampu hidup mandiri setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Berbagai kegiatan seperti pelatihan orientasi dan mobilitas, pembelajaran huruf Braille, pelatihan keterampilan kerja, pendampingan psikososial, serta pembinaan karakter menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan diri, kemampuan adaptasi, dan kesiapan penyandang disabilitas untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat aspek psikologis dan sosial sehingga penerima manfaat memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari terselesainya proses pelayanan di panti, melainkan juga dari kemampuan penyandang disabilitas mempertahankan kemandirian, produktivitas, dan fungsi sosialnya setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan keamanan sosial tersebut diperkuat oleh adanya landasan regulasi yang memberikan jaminan hukum terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2024, dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019. Keberadaan regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tercermin dari meningkatnya rasa percaya diri, kemampuan hidup mandiri, keterampilan, serta penerimaan sosial penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan perlindungan sosial pada indikator keamanan sosial memerlukan sinergi yang berkesinambungan antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar penyandang disabilitas tetap memperoleh rasa aman, kesempatan yang setara, akses terhadap berbagai layanan publik, serta peluang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan yang inklusif.

Wawancara dengan Bapak Agus Widodo selaku Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya memberikan rasa aman bagi penyandang disabilitas melalui program rehabilitasi yang dilaksanakan di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia. Pemerintah tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan dasar selama di panti, tetapi juga pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan mental, serta pendampingan agar setelah kembali ke masyarakat mereka bisa hidup lebih mandiri. Program ini didukung oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Widodo selaku Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, keberlanjutan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas diwujudkan melalui penyelenggaraan program rehabilitasi sosial yang berorientasi pada pemberian rasa aman, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan kapasitas individu. Perlindungan sosial dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan yang bersifat sementara, tetapi sebagai suatu proses yang sistematis untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak-haknya secara menyeluruh. Melalui Panti Sosial Bina Netra Hit Bia, pemerintah menyediakan lingkungan rehabilitasi yang kondusif dengan memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, sehingga mereka dapat menjalani proses pemulihan dan pengembangan diri secara optimal. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan sosial menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan penyandang disabilitas sebelum mereka kembali ke lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga diarahkan pada pengembangan kemampuan personal dan sosial penyandang disabilitas. Hal tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan mental, serta pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan selama proses rehabilitasi. Berbagai bentuk layanan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi, rasa percaya diri, dan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial serta memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, rehabilitasi sosial berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang mempersiapkan penyandang disabilitas agar tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah setelah menyelesaikan program rehabilitasi.

Keberlanjutan perlindungan sosial tersebut juga didukung oleh kerangka regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi dasar normatif yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Implementasinya diperkuat melalui Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026 serta Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sinergi antara kebijakan nasional, provinsi, dan pemerintah daerah tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan perlindungan sosial tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan rehabilitasi di panti, tetapi juga melalui kebijakan yang menjamin kesinambungan pelayanan, perlindungan hak, dan peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas secara inklusif dan berkelanjutan.

Wawancara dengan Bapak Gresmi Lasa selaku Kepala UPTD Tuna Netra Panti Tuna Netra Hit Bia Kupang:

Seluruh penerima manfaat yang tinggal di Panti Hit Bia mendapatkan perlindungan selama mengikuti rehabilitasi. Kebutuhan makan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, hingga pembinaan sehari-hari semuanya dipenuhi oleh panti agar mereka merasa aman dan nyaman selama proses pembelajaran. Selain itu, para penyandang disabilitas juga dibimbing untuk belajar mandiri melalui pelatihan orientasi mobilitas, Braille, keterampilan kerja, serta berbagai kegiatan yang bisa menjadi bekal ketika mereka kembali ke keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gresmi Lasa selaku Kepala UPTD Tuna Netra Panti Sosial Bina Netra Hit Bia Kupang, pelaksanaan rehabilitasi sosial di panti dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip perlindungan sosial yang komprehensif terhadap seluruh penerima manfaat. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan berbagai kebutuhan dasar, seperti penyediaan tempat tinggal, makanan, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pembinaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian sosial bagi penyandang disabilitas selama mengikuti proses rehabilitasi. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar secara berkelanjutan, penyandang disabilitas dapat menjalani proses rehabilitasi dalam lingkungan yang kondusif sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

Selain berorientasi pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi yang dilaksanakan di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia juga diarahkan pada pengembangan kapasitas individu melalui berbagai program pemberdayaan. Penyandang disabilitas memperoleh pelatihan orientasi dan mobilitas untuk meningkatkan kemampuan beraktivitas secara mandiri, pembelajaran huruf Braille sebagai sarana meningkatkan akses terhadap pendidikan dan informasi, serta pelatihan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan masing-masing individu. Berbagai bentuk pelatihan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial tidak hanya berfungsi sebagai proses pemulihan, tetapi juga sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kompetensi, kepercayaan diri, dan kemampuan adaptasi penyandang disabilitas dalam menghadapi kehidupan sosial dan dunia kerja.

Proses pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan perlindungan sosial pasca rehabilitasi. Pembinaan tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pembentukan sikap, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan bersosialisasi yang diperlukan ketika penyandang disabilitas kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, rehabilitasi di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia tidak berhenti pada pemberian layanan selama masa tinggal di panti, melainkan mempersiapkan penerima manfaat agar mampu hidup secara mandiri, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan perlindungan sosial diwujudkan melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek perlindungan, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas sebagai bekal bagi penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan setelah menyelesaikan program rehabilitasi.

Gambar 5.1

Ruang Makan Panti Sosial Bina Netra Hit Bia Kupang

Sumber dokumentasi penulis tanggal 5 Juni 2026

Ruang makan yang ditunjukkan pada Gambar 5.1 merupakan salah satu fasilitas pendukung yang mencerminkan pelaksanaan indikator keamanan sosial di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia Kupang. Keamanan sosial dalam konteks perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan perlindungan dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang memungkinkan penyandang disabilitas menjalani kehidupan secara layak selama mengikuti program rehabilitasi. Ruang makan yang bersih, tertata rapi, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, serta dilengkapi meja dan kursi yang memadai menunjukkan adanya upaya panti dalam menyediakan lingkungan yang aman,

nyaman, dan mendukung aktivitas sehari-hari para penerima manfaat. Penyediaan makanan bergizi secara teratur menjadi bagian penting dalam menjamin kesehatan fisik penerima manfaat sehingga mereka dapat mengikuti seluruh rangkaian program rehabilitasi secara optimal.

Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang diterapkan oleh Panti Sosial Bina Netra Hit Bia kepada seluruh penerima manfaat selama berada di lingkungan panti. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh penyandang disabilitas yang mengikuti program rehabilitasi memperoleh jaminan atas kebutuhan makan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pembinaan sosial secara menyeluruh. Kondisi ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi penerima manfaat karena kebutuhan hidup sehari-hari telah dipenuhi oleh panti tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, para penyandang disabilitas dapat lebih berkonsentrasi mengikuti proses rehabilitasi dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki tanpa dibebani oleh persoalan pemenuhan kebutuhan hidup.

Selain memberikan perlindungan terhadap kebutuhan dasar, indikator keamanan sosial juga diwujudkan melalui pembinaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Selama menjalani rehabilitasi, penyandang disabilitas netra memperoleh pelatihan orientasi dan mobilitas, pembelajaran huruf Braille, pelatihan keterampilan kerja, serta berbagai kegiatan pengembangan diri yang dipersiapkan sebagai bekal ketika mereka kembali ke keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, keamanan sosial yang diberikan oleh Panti Sosial Bina Netra Hit Bia tidak hanya berorientasi pada perlindungan selama masa rehabilitasi, tetapi juga diarahkan untuk membangun kemampuan adaptasi, rasa percaya diri, dan kemandirian penerima manfaat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan perlindungan sosial pasca rehabilitasi dimulai dari terciptanya lingkungan yang aman, terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta didukung oleh proses pembinaan yang berkesinambungan selama berada di panti.

Wawancara dengan Ibu Dewiyanti Elisabeth Folla selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Tuna Netra UPTD Tuna Netra dan Karya Wanita Hit Bia Kupang:

Keamanan sosial bagi penyandang disabilitas tidak hanya berarti memberikan perlindungan selama berada di panti, tetapi juga mempersiapkan mereka agar mampu hidup mandiri setelah selesai mengikuti rehabilitasi. Selama di panti, para peserta memperoleh pembinaan fisik, mental, sosial, pendidikan, serta berbagai keterampilan sesuai kemampuan masing-masing. Pihak panti juga terus memberikan motivasi agar mereka percaya diri dan tidak merasa minder ketika kembali hidup bersama keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewiyanti Elisabeth Folla selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Tuna Netra UPTD Tuna Netra dan Karya Wanita Hit Bia Kupang, konsep keamanan sosial dalam penyelenggaraan rehabilitasi tidak hanya dimaknai sebagai upaya memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas selama berada di lingkungan panti, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan yang mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan secara mandiri setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan sosial memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu menjamin keberlangsungan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui penguatan kapasitas individu sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan ketika kembali ke masyarakat. Dengan demikian, rehabilitasi sosial diposisikan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas untuk mencapai kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat.

Dalam pelaksanaannya, program rehabilitasi di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia disusun secara komprehensif melalui pembinaan fisik, mental, sosial, pendidikan, serta pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Pembinaan fisik bertujuan meningkatkan kesehatan dan kemampuan fungsional penyandang disabilitas, sedangkan pembinaan mental dan sosial diarahkan untuk membangun kepercayaan diri, kemampuan berinteraksi, serta kesiapan menghadapi kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, pendidikan dan pelatihan keterampilan diberikan sebagai bekal untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas sehingga penyandang disabilitas memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh kemandirian ekonomi setelah menyelesaikan rehabilitasi. Pendekatan yang berorientasi pada pengembangan potensi individu tersebut mencerminkan bahwa perlindungan sosial tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif.

Selain penguatan kapasitas, aspek psikososial menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan perlindungan sosial pasca rehabilitasi. Berdasarkan hasil wawancara, pihak panti secara berkelanjutan memberikan motivasi dan pendampingan kepada penyandang disabilitas agar memiliki rasa percaya diri, mampu menerima kondisi dirinya secara positif, serta tidak mengalami perasaan rendah diri ketika kembali ke lingkungan keluarga maupun masyarakat. Upaya tersebut merupakan bentuk intervensi sosial yang bertujuan memperkuat resiliensi individu sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial secara lebih baik. Oleh karena itu, keberlanjutan perlindungan sosial di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keterampilan, tetapi juga melalui pembentukan karakter, penguatan mental, serta pemberian dukungan psikososial yang berperan penting dalam mewujudkan integrasi sosial dan peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

Wawancara dengan Yusak Beti selaku Penyandang Disabilitas Tuna Netra Panti Tuna Netra Hit Bia Kupang:

Selama tinggal di Panti Hit Bia saya merasa aman karena semua kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh pihak panti. Saya mendapatkan tempat tinggal, makan, pendidikan, serta berbagai pelatihan yang membuatnya semakin percaya diri. Para pembina selalu memberikan pendampingan dan mengajarkan cara hidup mandiri sehingga ia merasa memiliki bekal yang cukup ketika nanti kembali ke rumah dan hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusak Beti selaku penyandang disabilitas tuna netra dan penerima manfaat di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia Kupang, pelaksanaan program rehabilitasi telah memberikan rasa aman melalui pemenuhan kebutuhan dasar selama menjalani proses pembinaan di panti. Rasa aman tersebut tercermin dari tersedianya tempat tinggal, kebutuhan pangan, layanan pendidikan, serta berbagai fasilitas pendukung yang memungkinkan penerima manfaat mengikuti rehabilitasi tanpa mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang diberikan oleh panti telah memenuhi aspek keamanan sosial, yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai prasyarat bagi penyandang disabilitas untuk menjalani proses rehabilitasi secara optimal dan berkelanjutan.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan kepercayaan diri penyandang disabilitas. Melalui layanan pendidikan dan berbagai pelatihan keterampilan, penerima manfaat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Proses pembelajaran tersebut tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk keyakinan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan produktif. Dengan demikian, rehabilitasi sosial

berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang memperkuat modal manusia (human capital) sehingga penyandang disabilitas memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa rehabilitasi.

Pendampingan yang dilakukan oleh para pembina menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses rehabilitasi dan keberlanjutan perlindungan sosial pasca rehabilitasi. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penguasaan keterampilan hidup sehari-hari, tetapi juga pada pembentukan sikap mandiri, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Pengalaman Yusak Beti menunjukkan bahwa proses pembinaan yang berlangsung secara intensif telah memberikan bekal yang memadai untuk menghadapi kehidupan bersama keluarga dan masyarakat setelah keluar dari panti. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh penyediaan layanan selama rehabilitasi, tetapi juga oleh efektivitas pendampingan dalam mempersiapkan penyandang disabilitas agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri, berdaya, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Wawancara dengan Shinta Fomeni selaku Penyandang Disabilitas Tuna Netra Panti Tuna Netra Hit Bia Kupang:

Selama mengikuti program rehabilitasi dirinya merasa nyaman karena lingkungan panti sangat mendukung proses belajar dan pengembangan diri. Selain itu para pembina selalu memperlakukan semua peserta dengan baik tanpa membedakan satu sama lain. Selain belajar membaca Braille dan keterampilan lainnya, saya juga merasa lebih berani berinteraksi dengan orang lain sehingga tidak lagi merasa takut atau minder ketika nantinya kembali ke masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Shinta Fomeni selaku penyandang disabilitas tuna netra dan penerima manfaat di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia Kupang, pelaksanaan program rehabilitasi telah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi proses pembelajaran serta pengembangan kapasitas individu. Kondisi lingkungan yang mendukung tersebut memberikan rasa nyaman kepada penerima manfaat dalam mengikuti seluruh tahapan rehabilitasi, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri secara optimal tanpa mengalami tekanan maupun diskriminasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keamanan sosial dalam rehabilitasi tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga melalui penciptaan lingkungan sosial yang inklusif, suportif, dan menghargai martabat setiap penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki hak yang sama untuk berkembang.

Para pembina menerapkan prinsip kesetaraan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh penerima manfaat tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi individu. Perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif mencerminkan implementasi prinsip penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan perlindungan sosial. Pendekatan tersebut berkontribusi terhadap terbentuknya hubungan yang positif antara pembina dan penerima manfaat, sehingga tercipta suasana rehabilitasi yang mendorong tumbuhnya rasa percaya diri, motivasi belajar, serta partisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembinaan. Dengan demikian, kualitas interaksi sosial di lingkungan panti menjadi salah satu faktor penting yang mendukung efektivitas proses rehabilitasi sosial.

Selain memperoleh kemampuan teknis, seperti membaca huruf Braille dan berbagai keterampilan lainnya, penerima manfaat juga mengalami peningkatan kemampuan dalam aspek psikososial. Berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh Shinta Fomeni, proses rehabilitasi telah meningkatkan keberanian untuk berinteraksi dengan orang lain serta

mengurangi rasa takut dan rendah diri ketika akan kembali ke lingkungan keluarga maupun masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi, dan kesiapan sosial penyandang disabilitas. Oleh karena itu, keberlanjutan perlindungan sosial pasca rehabilitasi tidak hanya diukur dari keberhasilan peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi, tetapi juga dari keberhasilan membangun kesiapan psikologis dan sosial yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi secara aktif, setara, dan inklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

Wawancara dengan Bapak Nikolaus Tefa selaku Masyarakat di Kelurahan Maulafa:

Keberadaan Panti Hit Bia sangat membantu penyandang disabilitas netra untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Setelah mengikuti pembinaan di panti, banyak penyandang disabilitas menjadi lebih mandiri, memiliki keterampilan, dan mampu berinteraksi dengan masyarakat. Saya berharap pemerintah terus memberikan perhatian karena penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk hidup aman, bekerja, dan dihargai di lingkungan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nikolaus Tefa selaku masyarakat di Kelurahan Maulafa, keberadaan Panti Sosial Bina Netra Hit Bia dinilai memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas netra. Program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh panti dipandang tidak hanya memberikan perlindungan selama proses pembinaan, tetapi juga menghasilkan perubahan positif pada kemampuan individu setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Persepsi masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial memiliki dampak yang dirasakan secara langsung oleh lingkungan sosial, khususnya dalam meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas untuk menjalankan fungsi sosialnya secara lebih optimal. Dengan demikian, keberlanjutan perlindungan sosial tidak hanya tercermin dari penyediaan layanan di dalam panti, tetapi juga dari keberhasilan penerima manfaat dalam beradaptasi dan menjalani kehidupan secara mandiri di tengah masyarakat.

Program rehabilitasi telah memberikan bekal keterampilan dan membentuk kemandirian penyandang disabilitas sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut pandangan masyarakat, penyandang disabilitas yang telah mengikuti pembinaan di Panti Hit Bia menunjukkan peningkatan kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari, serta mampu membangun hubungan sosial yang lebih baik. Temuan ini memperlihatkan bahwa rehabilitasi sosial tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek individu, tetapi juga meningkatkan penerimaan sosial (*social acceptance*) terhadap penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa program rehabilitasi telah mendukung proses reintegrasi sosial yang merupakan salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Selain itu, harapan masyarakat agar pemerintah terus memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas menunjukkan bahwa keberlanjutan perlindungan sosial memerlukan komitmen yang konsisten dari berbagai pemangku kepentingan. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga rehabilitasi, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan sektor lainnya dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Pengakuan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh rasa aman, kesempatan bekerja, serta penghargaan dalam kehidupan sosial sejalan dengan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, keberhasilan program rehabilitasi di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia perlu diikuti dengan penguatan kebijakan dan partisipasi masyarakat agar keberlanjutan perlindungan sosial pasca rehabilitasi dapat diwujudkan secara lebih efektif, inklusif, dan berkesinambungan.

Wawancara dengan Ibu Rosalinda Kenat selaku Masyarakat di Kelurahan Maulafa:

Masyarakat di sekitar panti menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan baik dan tidak lagi memandang mereka berbeda. Para penyandang disabilitas yang telah mengikuti pembinaan di Panti Hit Bia terlihat lebih percaya diri, mampu beraktivitas secara mandiri, dan mulai terlibat dalam kegiatan masyarakat. Saya berharap pemerintah tetap melanjutkan program perlindungan sosial dan pendampingan agar para penyandang disabilitas terus mendapatkan rasa aman serta kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosalinda Kenat selaku masyarakat di Kelurahan Maulafa, keberlanjutan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan proses rehabilitasi di dalam panti, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas setelah kembali ke lingkungan sosialnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar Panti Sosial Bina Netra Hit Bia telah menunjukkan sikap yang lebih inklusif dengan menerima penyandang disabilitas sebagai bagian dari komunitas tanpa memberikan perlakuan yang diskriminatif. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perubahan persepsi sosial yang positif, sehingga lingkungan masyarakat mampu menjadi ruang yang aman dan mendukung bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Penerimaan sosial ini merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan keberlanjutan perlindungan sosial karena memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyandang disabilitas yang telah mengikuti program rehabilitasi di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam aspek psikologis dan sosial. Peningkatan rasa percaya diri, kemampuan melakukan aktivitas secara mandiri, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan menjadi bukti bahwa rehabilitasi sosial telah memberikan dampak yang positif terhadap proses reintegrasi sosial penerima manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi tidak hanya berhasil meningkatkan keterampilan dan kapasitas individu, tetapi juga mempersiapkan penyandang disabilitas agar mampu membangun hubungan sosial yang lebih baik dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, keberhasilan rehabilitasi dapat diukur melalui meningkatnya kemampuan penyandang disabilitas dalam menjalankan peran sosial secara aktif dan produktif setelah kembali ke masyarakat.

Selain keberhasilan rehabilitasi, masyarakat juga menilai bahwa keberlanjutan perlindungan sosial memerlukan dukungan kebijakan dan pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah. Harapan agar program perlindungan sosial dan pendampingan tetap dilanjutkan menunjukkan bahwa proses pemberdayaan penyandang disabilitas tidak berakhir ketika mereka menyelesaikan rehabilitasi di panti, melainkan memerlukan penguatan melalui layanan lanjutan di lingkungan masyarakat. Pendampingan yang berkelanjutan akan membantu penyandang disabilitas mempertahankan kemandirian, meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja, memperluas partisipasi sosial, serta menjamin terpenuhinya hak-hak mereka secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjamin rasa aman serta kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan

bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh kesimpulan bahwa indikator keamanan sosial dalam keberlanjutan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas pasca program rehabilitasi di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur telah diimplementasikan secara komprehensif melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan lingkungan rehabilitasi yang aman dan kondusif, serta penguatan kapasitas penerima manfaat. Keamanan sosial diwujudkan tidak hanya melalui penyediaan tempat tinggal, makanan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembinaan selama berada di panti, tetapi juga melalui pelatihan orientasi mobilitas, pembelajaran Braille, keterampilan kerja, pendampingan psikososial, dan pembentukan karakter yang bertujuan meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2024, dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tercermin dari meningkatnya rasa percaya diri, kemampuan hidup mandiri, keterampilan, serta penerimaan sosial yang semakin baik di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan perlindungan sosial pada indikator keamanan sosial tidak hanya bergantung pada layanan rehabilitasi di dalam panti, tetapi juga memerlukan sinergi yang berkesinambungan antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin penyandang disabilitas tetap memperoleh rasa aman, kesempatan yang setara, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan inklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Keberlanjutan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Pasca Program Rehabilitasi pada Panti Sosial Bina Netra Hit Bia Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Perlindungan Sosial bagi Disabilitas Binaan Dinas Sosial Provinsi NTT di Kelurahan Maulafa Kota Kupang), penulis menyimpulkan bahwa keberlanjutan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas telah berjalan secara efektif dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat, yang tercermin dari terpenuhinya keamanan sosial selama dan pasca rehabilitasi, terwujudnya akses universal terhadap layanan tanpa diskriminasi, serta tersalurkannya bantuan ekonomi yang mendukung kemandirian, meskipun masih terdapat sejumlah kendala teknis dan keberlanjutan pendampingan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Keamanan Sosial

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa keamanan sosial bagi penyandang disabilitas di Panti Sosial Bina Netra Hit Bia diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara komprehensif, meliputi tempat tinggal, makanan bergizi, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pembinaan mental dan sosial. Panti tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan selama masa rehabilitasi, tetapi juga membekali penerima manfaat dengan pelatihan orientasi dan mobilitas, pembelajaran huruf Braille, keterampilan kerja, serta pendampingan psikososial yang bertujuan menumbuhkan kepercayaan diri dan kesiapan penyandang disabilitas untuk kembali hidup di tengah masyarakat.

Keberhasilan tersebut didukung oleh landasan regulasi yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2024, dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor

2 Tahun 2019, yang memberikan kepastian hukum atas pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial, pengelola panti, penerima manfaat, dan masyarakat menunjukkan bahwa keamanan sosial telah menciptakan lingkungan rehabilitasi yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi, serta mendorong penerimaan sosial yang semakin baik setelah penyandang disabilitas kembali ke masyarakat, sehingga secara keseluruhan indikator keamanan sosial dapat dinilai telah terlaksana dengan baik.

Akses Universal

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa Panti Sosial Bina Netra Hit Bia menerapkan prinsip akses universal dengan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh penyandang disabilitas untuk mengikuti layanan rehabilitasi tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi individu. Seluruh penerima manfaat memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan, pembelajaran huruf Braille, orientasi dan mobilitas, serta pelatihan vokasional seperti pijat, pertanian, dan peternakan sesuai dengan minat dan potensi masing-masing.

Implementasi akses universal tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2024, yang menjamin kesetaraan akses terhadap layanan publik bagi penyandang disabilitas. Program tersebut terbukti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan kepercayaan diri penerima manfaat, serta memperkuat proses reintegrasi sosial dan penerimaan masyarakat. Meskipun demikian, keberlanjutan akses universal masih memerlukan perluasan cakupan layanan agar semakin banyak penyandang disabilitas dapat memperoleh manfaatnya secara merata.

Bantuan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa bantuan ekonomi bagi penyandang disabilitas diwujudkan melalui pendekatan pemberdayaan yang mengintegrasikan pelatihan keterampilan vokasional dengan pemberian bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000 kepada setiap penerima manfaat yang memenuhi persyaratan. Bantuan tersebut dirancang sebagai stimulus untuk mengembangkan usaha produktif sesuai dengan keterampilan yang diperoleh selama rehabilitasi, seperti pijat, pertanian, peternakan, dan kerajinan, serta didukung oleh landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2024, dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bantuan ekonomi belum sepenuhnya optimal karena masih terbatasnya pendampingan berkelanjutan dalam aspek perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk pasca penyaluran bantuan. Penyandang disabilitas memandang kesempatan bekerja dan berusaha sebagai kebutuhan yang lebih mendasar dibandingkan sekadar menerima bantuan finansial, sementara dukungan masyarakat melalui penggunaan jasa dan pembelian produk masih perlu ditingkatkan, sehingga keberlanjutan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panti Sosial Bina Netra Hit Bia perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar serta pembinaan mental dan sosial bagi penerima manfaat, sekaligus memperkuat mekanisme pendampingan pasca rehabilitasi agar rasa aman dan kemandirian yang telah dibangun selama di panti dapat terus dipertahankan setelah penerima manfaat kembali ke

masyarakat.

2. Panti Sosial Bina Netra Hit Bia perlu memperluas cakupan dan variasi program pelatihan vokasional serta meningkatkan sosialisasi mengenai prinsip akses universal kepada masyarakat luas, agar semakin banyak penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk mengikuti layanan rehabilitasi tanpa hambatan diskriminasi maupun keterbatasan informasi.
3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan intensitas pendampingan usaha pasca penyaluran bantuan modal, khususnya dalam aspek perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk, agar bantuan ekonomi yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh penyandang disabilitas.
4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Panti Sosial Bina Netra Hit Bia perlu membangun kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga keuangan untuk memperluas akses permodalan dan pemasaran bagi penyandang disabilitas, sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah.
5. Masyarakat di Kelurahan Maulafa dan sekitarnya diharapkan terus berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, baik melalui penerimaan sosial yang inklusif maupun dukungan ekonomi dengan menggunakan jasa atau produk yang dihasilkan penyandang disabilitas, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas yang mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia., C. I. D. D. I. C. for P. with D. in, & Disability. (2025). Editorial notes. 14(02), 2050.
- Kementerian Sosial RI. (2010). Pedoman Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ODK) Rungu Wicara Dalam Panti. Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial: Penulis
- Media, suparman marzuki dkk. K. T., Kauman GM I / 332 RT 46 RW 12, Y. 55122 T. /Faks. 0274-375314, & Totalmedia_publish@yahoo.co.id, E. (2019). PEMENUHAN HAK MANUSIA.
- Populasi, T., & Miskin, P. (2019). PERLINDUNGAN SOSIAL KOMPREHENSIF DI INDONESIA 200, 1–14.
- Ratnaningsih, Erna. (2016, Mei 8). Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Diunduh dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/>.
- Rotinsulu, Maulani, et al. (2012). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Rungu, B., Psbrw, W., & Naibonat, E. (2013). PEMBINAAN LANJUT DAN KONDISI EKS PENERIMA MANFAAT DI PANTI SOSIAL BINA RUNGU WICARA (PSBRW) EFATA NAIBONAT KUPANG After care And Ex-Client Condition At Panti Sosial Bina Rungu Wicara Efata Naibonat Kupang M. Syawie. 18(02), 251–260.
- Sholihah, I., Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, J. S. E. imas. sholihah1708@gmail. co., & Abstract. (2016). KEBIJAKAN BARU: JAMINAN PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS THE NEW POLICY: UNDERTAKING THE RIGHTS OF PERSONS WITH. KEBIJAKAN BARU: JAMINAN PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS THE NEW POLICY: UNDERTAKING THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES, 2(02), 166–184.
- Sosial, P. S. K., Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, J. T. E. oman@umm. ac. id., & Diterima: (2020). PROGRAM PENINGKATAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA (Studi

di Panti Rehabilitasi Bina Netra Malang , Jawa Timur) SKILL IMPROVEMENT PROGRAM FOR PERSONS WITH VISUAL DISABILITY (Study on Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra in Malang City ,. 9(02).

Tahun, K. G. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (JAMINAN SOSIAL) DI Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Hak-Hak. 8, 1–20. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2598>

TENTANG, U.-U. R. I. N. 39 T. 1999, & MANUSIA, H. A. (1999). Presiden republik indonesia.

Utami, T. K., Hukum, P. S., & Hukum, F. (2019). MODEL PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS MODEL FOR SOCIAL PROTECTION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN CIANJUR DISTRICT IN PERSPECTIVE PENDAHULUAN 11, 131–139.

Link google

<https://www.jstor.org/stable/i383532>

<https://url2.cl/w68n4>

[https://pryakkum.org/read/39/program-perlindungan-sosial-bagi-difabel-di-indonesia-charity-atau-berdasarkan-ham-\[sebuah-perbandingan-dari-program-perlindungan-sosial-di-australia\].htm](https://pryakkum.org/read/39/program-perlindungan-sosial-bagi-difabel-di-indonesia-charity-atau-berdasarkan-ham-[sebuah-perbandingan-dari-program-perlindungan-sosial-di-australia].htm)

<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2283/1129>